



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

KASIM HUSAIN bin AYUBA HUSAIN, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak lulus SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Merah, Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I.

KARTIN TALIB binti OSE TALIB, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Merah, Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak berperkara.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 6 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 7 Maret 2014 dengan Nomor 29/Pdt.P/2014/PA.Tlm telah

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2014/PA.Tlm

Page : 1 of 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Februari 1997, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman (dulu masih berada dalam wilayah Kabupaten Gorontalo) dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, akan tetapi hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti surat nikah.
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama YAHYA TALIB yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Paguyaman atas nama HENI BANO. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah HUSIN MALAHIKA dan SULEMAN TAHIR.
3. Bahwa setelah pengucapan ijab kabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai serta Pemohon I juga telah mengucapkan janji taklik talak.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki Masing-masing bernama :



- AYUN HUSAIN, lahir tanggal 23 Oktober 1998.
 - ALIM HUSAIN, lahir tanggal 2 Agustus 2000.
7. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman maka para Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Agama Tilamuta dapat menetapkan serta menyatakan perkawinan para Pemohon adalah sah menurut hukum.
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (KASIM HUSAIN bin AYUBA HUSAIN) dan Pemohon II (KARTIN TALIB binti OSE TALIB) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 1997 adalah sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi.



Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talamuta yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. GAFAR BAGOU bin RUBEN BAGOU, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Holidai, Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama KASIM HUSAIN dan Pemohon II bernama KARTIN TALIB sebagai tetangga dan keduanya sebagai suami isteri.
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 9 Februari 1997 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah kakak Pemohon II yang bernama YAHYA TALIB karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, kakak kandung Pemohon II mewakilkan kepada Pembantu PPN Kecamatan Paguyaman yang bernama HENI BANO untuk mengucapkan ijab.
- Bahwa kakak kandung Pemohon II mewakilkan kepada HENI BANO karena kakak kandung Pemohon II tidak bisa mengucapkan kalimat ijab.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah HUSIN MALAHIKA sebagai Kepala Desa pada waktu itu dan SULEMAN TAHIR sebagai Kepala Dusun.
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu telah dewasa dan adil.
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa istri pertama Pemohon I meninggal dunia pada tahun 1992.
- Bahwa sebelum menikah, para Pemohon sudah mengurus persyaratan administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman namun Buku Nikah tidak ada.
- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, belum pernah bercerai ataupun salah satu pihak telah menikah lagi dan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 orang anak.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumahtangga, tidak ada pihak lain yang keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya.
- 2. HENI M. BANO bin MOHAMAD BANO, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Wilayah Kecamatan Paguyaman, bertempat tinggal di Dusun Taruna, Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama KASIM HUSAIN dan Pemohon II bernama KARTIN TALIB sebagai tetangga dan keduanya sebagai suami isteri.
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 9 Februari 1997 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah kakak Pemohon II yang bernama YAHYA TALIB karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia.
 - Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, kakak kandung Pemohon II mewakili kepada saya selaku Pembantu PPN Kecamatan Paguyaman pada waktu itu untuk mengucapkan ijab.



- Bahwa kakak kandung Pemohon II mewakilkan kepada saya karena kakak kandung Pemohon II tidak bisa mengucapkan kalimat ijab.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah HUSIN MALAHIKA sebagai Kepala Desa pada waktu itu dan SULEMAN TAHIR sebagai Kepala Dusun.
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu telah dewasa dan adil.
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa istri pertama Pemohon I meninggal dunia pada tahun 1992.
- Bahwa sebelum menikah, para Pemohon sudah mengurus persyaratan administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman namun Buku Nikah tidak ada.
- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, belum pernah bercerai ataupun salah satu pihak telah menikah lagi dan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 orang anak.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumahtangga, tidak ada pihak lain yang keberatan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya.



Bahwa para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dimana permasalahan yang dimohon penyelesaian ke Pengadilan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) yaitu pihak Pemohon dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara ini terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara *voluntair*, karena yurisdiksi *voluntair* (kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadiliperkara *voluntair*) hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh perundang-undangan.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa di antara kewenangan Peradilan Agama adalah "pernyataan tentang sahnya



perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.” Frase “pernyataan tentang sahnya perkawinan” dipahami sebagai kewenangan Peradilan Agama mengadili perkara pengesahan nikah secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh suami isteri (Pemohon I dan Pemohon II) sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) KHI dan pihak yang paling berkepentingan dengan perkawinan tersebut, maka pengadilan berwenang mengadili perkara ini secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon didasarkan atas adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 1997 menurut tata cara hukum Islam namun tidak memperoleh akta atau sesuatu apapun untuk membuktikan pernikahannya.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakap (*competence*) menjadi saksi memberikan keterangan di bawah sumpah serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 9 Februari 1997, keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan serta keduanya beragama Islam. Pada waktu menikah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak Pemohon II yang bernama YAHYA TALIB karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia, yang memberikan kuasa kepada Pembantu PPN Kecamatan Paguyaman bernama HENI BANO untuk mewakili kakak



Pemohon II untuk mengucapkan ijab karena kakak kandung Pemohon II tidak mengetahui kalimat ijab, Para Pemohon menikah dihadiri pula oleh dua orang saksi yakni HUSIN MALAHIKA sebagai Kepala Desa dan SULEMAN TAHIR sebagai Kepala Dusun dan kedua saksi beragama Islam dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai, akad nikah dilaksanakan dalam satu majelis serta pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis, sebelum menikah, para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman namun tidak terbit buku nikah. Selama dalam pernikahan keduanya tidak pernah cerai ataupun salah satu menikah lagi dan telah dikaruniai 2 orang anak dan selama pernikahan keduanya, tidak ada orang yang keberatan.

Menimbang, permohonan para Pemohon disandarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 angka (22) jo. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) poin e, maka lebih lanjut Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam seperti ada tidaknya halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39–44 Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikah karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon mendalilkan yang juga didukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa para



Pemohon masing-masing beragama Islam dan melaksanakan perkawinan menurut agama Islam. Agama adalah keyakinan bersifat abstrak yang pada hakekatnya hanya pribadi bersangkutan yang paling mengetahui, sehingga untuk membuktikan agama yang dianut seseorang didasarkan atas pengakuan serta amalan yang bersangkutan. Pengakuan dimaksud adalah pernyataan yang dibarengi dengan amalan yang menunjukkan agama yang dianut tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pada perkawinan para Pemohon ada wali yaitu kakak Pemohon II, ada dua orang saksi masing-masing beragama Islam, ada mahar berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Wali nikah, dua orang saksi, akad nikah, dan mahar merupakan ajaran Islam yang diamalkan para Pemohon pada saat pelaksanaan nikah membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada halangan hukum sehingga memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, serta pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14-29 KHI.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyebutkan pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Paguyaman, yang diperkuat pula dengan keterangan kedua saksi yang mengetahui perihal tersebut bahwa sebelum menikah para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman namun tidak terbit buku nikah, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa para Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi untuk keperluan pencatatan nikah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban PPN Pasal 3, Pasal 5,



Pasal 7, dan Pasal 9 ayat (2) jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 5 ayat (1) dan (2).

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya para Pemohon sebelum menikah telah memenuhi syarat administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman namun buku nikah tidak dapat diterbitkan karena tidak ada data tentang peristiwa nikah tersebut di kantor tersebut maka patut diduga bahwa tidak terbitnya buku nikah para Pemohon disebabkan Pembantu PPN tidak melaporkan peristiwa nikah tersebut kepada PPN sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rangkaian pelaksanaan perkawinan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah menjalaninya sesuai dengan ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan telah sesuai pula syarat dan rukun perkawinan yang membuktikan adanya itikad (maksud yang baik) dari para Pemohon untuk menaati aturan perkawinan. Sebaliknya tidak terbitnya buku nikah para Pemohon disebabkan oleh Pembantu PPN yang tidak melaporkan peristiwa nikah tersebut kepada PPN, sehingga kepentingan para Pemohon dalam hal ini patut dilindungi secara yuridis meskipun pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2004 (setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Menimbang, bahwa secara redaksional penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dikutip di atas menentukan bahwa pengesahan nikah hanya sebatas pada pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dengan meneliti secara seksama, frase “perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor



1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain” dalam penjelasan pasal tersebut dipahami sebagai perkawinan yang terjadi dan dijalankan menurut undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat disahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan metode analogi (*qiyas aulawi*) dipahami bahwa jika perkawinan yang terjadi dan dijalankan menurut undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan yang terjadi setelah dan dijalankan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dapat disahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon, maka menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan pengesahan nikah para Pemohon dapat dikabulkan dan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 1997 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo untuk mencatat perkawinan para Pemohon tersebut dan menerbitkan kutipan akta nikah dimaksud.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang



timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (KASIM HUSAIN bin AYUBA HUSAIN) dengan Pemohon II (KARTIN TALIB binti OSE TALIB) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 1997 di Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo.
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo untuk mencatat perkawinan para Pemohon tersebut dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah dimaksud.
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh **INDAH ABBAS, S.HI** sebagai Hakim dan didampingi oleh **Drs. HALIM AR. MOLOU, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. HALIM AR. MOLOU, M.H

Hakim,

Ttd

INDAH ABBAS, S.HI.



Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<u>Meterai</u>	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).